

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGGERAKKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat)**

WA EBI

**Sartono, S.Sos, M.Si
La Manguntara, S.Sos, M.A.P.**

Waebi@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan Kepala Desa Latugho terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Dari aspek konsultasi, Kepala Desa Latugho menunjukkan sudah mampu berkonsultasi dengan bawahan sebagai pimpinan desa, keputusan bersama Kepala Desa Latugho selalu memutuskan sesuatu dengan musyawarah bersama staf-stafnya pada saat rapat dikategorikan sudah baik. Aspek pembagian kekuasaan sudah mampu menunjukan sebagai unsur pemerintah desa bekerja sama dengan badan pemberdayaan desa dalam pembangunan dikategorikan baik, selanjutnya aspek desentralisasi menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa cukup mampu mengarahkan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan aspek manajemen demokrasi menunjukkan pengawasan tidak efektif .

Partisipasi masyarakat di Desa Latugho secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan. Dimana masyarakat menunjukkan antusias yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pengajuan ide-ide saat ikut rapat. Selanjutnya dari partisipasi pelaksanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi secara materi tetapi partisipasi secara tenaga tergolong rendah.

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Partisipasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu bangsa. Desa jugalah ujung tombak terselenggaranya pemerintahan di suatu negara. Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa Latugho adalah sebuah desa berada di wilayah administrasi Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat yang memiliki peranan besar dalam proses pembangunan ditingkat desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Latugho. Desa Latugho, yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lawa, memiliki luas wilayah 5,15 km² yang terdiri dari 2 dusun dan 4 rukun tetangga (RT). Desa Latugho terdiri dari 332 Kepala Keluarga dengan total penduduk 1357 jiwa (Profil Desa Latugho, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi kepala desa, dapat dijadikan masukan didalam merumuskan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Bagi penulis, untuk membangun kemampuan ilmiah penulis yang memfokuskan kajiannya pada masalah gaya kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan atau bahan pembanding dalam mengkaji masalah yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Menurut Wahjosumidjo (2005:17) kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh.

2. Pengertian Gaya Kepemimpinan

Menurut Thoha (2010:49) mengemukakan bahwa: "Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan". Menurut Herujito (2006:188) menyatakan gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut: "Gaya kepemimpinan bukan bakat, oleh karena itu gaya kepemimpinan dipelajari dan dipraktikkan dalam penerapannya harus sesuai dengan situasi yang dihadapi".

3. Jenis Jenis Gaya Kepemimpinan

Jenis-jenis gaya kepemimpinan menurut Horse yang dikutip oleh Suwanto (2011 : 157) antara lain :

1. Gaya kepemimpinan direktif. Gaya kepemimpinan ini membuat bawahan agar tau apa yang diharapkan pimpinan dari mereka, menjadwalkan kerja untuk dilakukan, dan member bimbingan khusus mengenai bagaimana menyelesaikan tugas.
2. Gaya kepemimpinan yang mendukung. Gaya kepemimpinan ini bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan.
3. Gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran mereka sebelum mengambil suatu keputusan.
4. Gaya kepemimpinan berorientasi prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapakan bawahan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka.

4. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dijelaskan bahwa:

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang;
 - 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) menetapkan peraturan desa;
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- 9) mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 10) mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 11) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 12) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 13) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 14) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 15) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 16) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell dalam Firmansyah (2009:43) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Jenis kelamin.
- b. Pendidikan.

c. Pekerjaan dan penghasilan.

D. Kerangka Pikir

menurut Yuki dalam Suwanto (2011:161), dimensi dalam gaya kepemimpinan mencakup konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Kemudian partisipasi masyarakat mengacu pada konsep yang dikemukakan Sutarto (2002:25) dimensi-dimensinya yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan rencana. Sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat mengacu pada Angell dalam Firmansyah (2009:43) yang mengatakan bahwa jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lamanya tinggal.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat, pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini adalah terdapat hal-hal yang layak diteliti. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tergolong masih minim. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti di Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif relatif dapat menganalisa realitas sosial secara mendalam.

C. Informan Penelitian

Untuk melengkapi data penelitian, maka ditetapkan informan penelitian terdiri dari dua unsur yaitu dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

1. Unsur pemerintah terdiri dari Kepala Desa Latugho, Sekretaris Desa Latugho, Kepala Urusan Pembangunan Desa Latugho, dan 2 orang Kepala Dusun.
2. Unsur masyarakat terdiri dari 2 orang tokoh masyarakat dan 3 orang perwakilan masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*), ini dilakukan dengan cara observasi kelokasi penelitian. Teknik yang digunakan dengan cara ini adalah:
 - a. Wawancara (*interview*) merupakan langkah pencarian atau pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung pada informan yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
 - b. Pengamatan (*Observasi*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian.
 - c. Dokumentasi, mencatat dokumen berkaitan dengan penelitian berupa bahan / laporan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh

data yang relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Latugho Kecamatan Lawa merupakan salah satu wilayah pedesaan di Kabupaten Muna Barat yang terletak ±12 Km dari Kantor Bupati Muna Barat. Hal ini artinya Desa Latugho Kecamatan Lawa merupakan desa yang cukup strategis dan dekat dari pusat pemerintahan kecamatan dan pemerintah kabupaten dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Aspek pokok yang menjadi urat nadi kehidupan di Desa Latugho Kecamatan Lawa yaitu keadaan alam, penduduk dan agama, pendidikan dan pekerjaan, serta budaya. Berikut akan dijelaskan detail tentang Desa Latugho Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat,

1. Kondisi Geografis

Desa Latugho merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat yang menjadi salah satu daerah tempat bermukim dan menetap orang-orang penduduk asli muna serta pendatang yang hendak mencari kehidupan. Berdasarkan data dari dokumen Desa Latugho Tahun 2017, Desa Latugho terletak di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah mencapai 85,17km². Yang terdiri dari 6 desa dan 2 kelurahan.

2. Keadaan Penduduk Desa Latugho

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2017 penduduk yang mendiami Desa Latugho berjumlah 1357 jiwa, dengan 332 KK. Dimana jumlah laki-laki sebanyak 606 jiwa, dan perempuan sebanyak 751 jiwa. Sesuai dengan data statistik yang diperoleh dari Desa Latugho, komposisi antara penduduk laki-laki dan perempuan ternyata penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dalam kategori usia produktif yakni usia 30-44 tahun berjumlah 376 jiwa, usia 15-29 tahun sebanyak 395 orang, di atas 45 tahun sebanyak 180 dari jumlah penduduk Desa Latugho Kecamatan Lawa, sementara sisanya merupakan golongan usia yang tidak produktif yang terdiri dari anak-anak usia sekolah berjumlah 406 orang.

3. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Latugho

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan vital untuk membangun masyarakat pada umumnya dalam usaha meningkatkan sumberdaya manusia sebagai salah satu modal dasar pembangunan. Untuk itu berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Menyadari arti pentingnya akan pendidikan tersebut maka pemerintah senantiasa melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan demi memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada anak bangsa untuk memperoleh pendidikan.

b. Agama dan Kepercayaan

Berbicara mengenai agama dan kepercayaan, maka yang akan muncul adalah pertanyaan tentang mengapa manusia percaya kepada sesuatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari padanya dan mengapa pula manusia melakukan berbagai macam cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Dengan adanya masalah-masalah itu, manusia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berkuasa atas dirinya, ada sesuatu yang maha kuasa. Oleh sebab itu, manusia berusaha melakukan berbagai macam cara untuk berhubungan dengan yang maha kuasa dan memohon pertolongan untuk memecahkan masalah tersebut, pada saat itulah manusia-manusia mulai mengenal agama atau religi. Penduduk yang bermukim di Desa Latugho, mayoritas memeluk agama Islam.

c. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian adalah suatu pekerjaan yang menjadi rutinitas sehari-hari setiap manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi alam tempat manusia itu tinggal seperti halnya masyarakat yang tinggal di daratan maka, mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani kebun atau petani ladang. Penduduk yang mendiami Desa Latugho mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam.

d. Struktur Organisasi dan Keadaan Aparat Desa Latugho

Untuk memperlancar kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya pembagian tugas yang jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya saling tumpah tindih dalam melaksanakan tugas pegawai. Oleh karenanya, perlu diusahakan terciptanya satu tim kerja yang solid, saling membantu dan saling menunjang satu sama lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya mempercepat tercapainya tujuan perusahaan.

B. Deskripsi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Desa Latugho dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki berbagai fungsi untuk menjalankan peran dan tugas, khususnya di dalam organisasi pemerintahan desa, termasuk akan menjalankan berbagai peran sebagai seorang pimpinan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti bagaimana menggerakkan kemampuan kerja pegawai serta masyarakat yang dipimpinnya. Di dalam penelitian ini akan dideskripsikan gaya pimpinan Kepala Desa. Untuk jelasnya mengenai berbagai dimensi tersebut dibahas sebagai berikut.

1. Konsultasi

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Latugho Kecamatan Lawa yang menyatakan bahwa: “ Saya sebagai Kepala Desa Latugho Kecamatan Lawa sudah menunjukkan konsultasi dengan baik. Apabila terdapat suatu masalah, saya sebagai kepala desa disini selalu melibatkan bawahan saya. Hal ini saya lakukan dengan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan membicarakan solusi apa yang cocok untuk permasalahan seperti ini. Jadi dalam hal keterlibatan bawahan itu penting karena mereka lebih banyak tahu tentang masalah yang terjadi dikantor Desa Latugho Kecamatan Lawa (Wawancara, 8 Januari 2018).

2. Keputusan Bersama

Pengambilan keputusan bersama pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya.

Pengambilan keputusan merupakan usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan (peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan dan sesudahnya).

3. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan kapasitas untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku orang kearah yang di inginkan. Suatu aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang. Lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Perlu diketahui bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal dimaksud tidak mengulangi kedaulatan NKRI, yang penggolongannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga pembagian kekuasaan tersebut bukan pembagian kedaulatan, melainkan hanya pembagian kekuasaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan atau yang sering disebut pembagian urusan. (HM. Agus Santoso, 2013 : 177).

4. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan juga dari pemerintah daerah kepada unit-unit kerja birokrasi pemerintah daerah. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal dalam bentuk desentralisasi dimana unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu.

5. Manajemen Demokrasi

Manajemen demokrasi adalah proses penilaian individu mengenai kemajuan penilaian individu mengenai pelaksanaan pekerjaan ditempat kerja untuk mempermudah kemajuan secara sistematis. Sementara itu banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Pegawai bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat konflik, kondisi fisik pekerjaan. .

C. Deskripsi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didesain oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses dimana masyarakat sebagai *stakeholder* terlibat, mempengaruhi, mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing secara aktif memprakarsai perbaikan kehidupan mereka melalui proses pembuatan keputusan dan sumber daya suatu penggunaanya.

1. Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu peran serta yang dilakukan pada tahap satu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pengambilan keputusan yang dimaksud disini adalah peran serta yang dilakukan pada tahap satu kegiatan sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Pelaksanaan Perencanaan

Partisipasi masyarakat yang tinggi pada saat perencanaan pembangunan, seperti pada rapat perencanaan pembangunan di Desa Latugho Kecamatan Lawa ternyata tidak diikuti dengan partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa merupakan tujuan dari pemerintah desa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi yang meningkat, maka perlunya dukungan dari gaya kepemimpinan kepala desa. Dalam artian bahwa gaya kepemimpinan kepala desa memberi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah hal-hal yang berkaitan dengan orientasi seksual masyarakat. Partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Hal ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendidikan

Faktor pendidikan dianggap penting karena melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan, bila salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan.

3. Pekerjaan

Menurut Yulianti (2012) partisipasi berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan Kepala Desa Latugho terdiri dari 5 aspek yaitu aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Dari aspek konsultasi, Kepala Desa Latugho menunjukkan sudah mampu berkonsultasi dengan bawahan sebagai pimpinan desa, keputusan bersama Kepala Desa Latugho selalu memutuskan sesuatu dengan musyawarah bersama staf-stafnya pada saat rapat dikategorikan sudah baik.
2. Partisipasi masyarakat di Desa Latugho secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan. Dimana masyarakat menunjukkan antusias yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pengajuan ide-ide saat ikut rapat. Selanjutnya dari partisipasi pelaksanaan, masyarakat menunjukkan partisipasi secara materi tetapi partisipasi secara tenaga tergolong rendah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlunya dukungan dari pimpinan Kepala Desa Latugho agar terus menerapkan kepemimpinan yang lebih baik lagi sehingga masyarakat sadar akan tugasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebaiknya informasi terkait rapat perencanaan pembangunan disebarakan dengan merata dan jelas, sehingga masyarakat paham tentang agenda rapat yang akan dilakukan di Desa Latugho.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan and White. 1987. *Melihat Pembangunan Sebagai Konsep Normatif dan Merupakan Eupemisme Untuk Perubahan Modernisasi dan Pertumbuhan di Indonesia*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdiknas Bapenas Adicitakaryanusa. Jakarta.
- Gibson, James L et al. 2006. *Organizations (Behavior, Structure, Processes)*. Twelfth Edition, McGraw Hill.
- Glenn R. 2002. *Money, The Financial System, and the Economy*. Boston, Pearson Education
- Hadari, Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Grasindo. Jakarta.
- Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Martinis Yamin dan Maisah. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen Masa Depan*. Bogor: IPB Press.
- Miftah Thoha . 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen, Devisi Buku. Perguruan Tinggi*. PT. Jakarta: Rajawali Grafindo. Persada.
- Saca Firmansyah. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. Diambil pada 20 Mei 2011 dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat>
- Siti Irene Astuti. 2009. *Desentralisasi Dan Partisipasi Dan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Suwatno. & Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajawali Grafindo. Persada.